

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia.

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan tingkat *Gross National Product* yang setinggi-tingginya, namun hal ini tidak dapat terlepas dari berbagai masalah ekonomi itu sendiri. Diantara masalah yang dimaksud yaitu pemberantasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja sebab hal ini menjadi pemicu timbulnya pertumbuhan suatu wilayah (Amalia, 2007:89). Dengan demikian, Indonesia yang menjadikan sasaran utamanya adalah pengembangan dan pembangunan lapangan kerja dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi kepada seluruh masyarakat. Selain hal tersebut digunakan pula sebagai untuk mengurangi kemampuan suatu daerah dan struktur perekonomian yang seimbang. Bagi Indonesia pengembangan ekonomi sangatlah diperlukan sehingga proses pembukaan lapangan kerja sangatlah diperlukan (Sukirno, 2005:445).

Pemberdayaan industri kecil dan menengah merupakan salah satu prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan, karena merupakan wujud kehidupan sebagian rakyat Indonesia paska krisis dan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya di banding industri besar. Industri kecil dan menengah juga merupakan sektor yang strategis bagi tiap daerah untuk mengurangi masalah pengangguran (Sari dan Husaini, 2015).

Usaha kecil menengah adalah usaha yang dijalankan oleh 1 atau 2 orang saja, atau usaha yang memiliki modal lebih kecil dari Rp. 50.000.000, disebut usaha kecil dan usaha memiliki modal lebih kecil dari Rp. 200.000.000 disebut usaha menengah. Tetapi ada pula yang menyebutkan usaha yang dijalankan 50-60 orang masih tergolong usaha kecil menengah. Wiraswasta dalam usaha bisnis menengah dan kecil sangat menunjang perekonomian bangsa Indonesia dikarenakan dengan adanya unit usaha kecil dan menengah selain mengurangi jumlah angka pengangguran UMKM juga berperan penting yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jumlah unit usaha yang terbentuk, penyerapan tenaga kerja, perannya dalam peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan sumbangannya terhadap ekspor nasional.

Peranan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia sebagai salah satu pendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi sektor UKM terhadap produk domestik nasional pada tahun 2016 bertumbuh sebesar 60,34 % dengan jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor ini adalah meningkat sebesar 97,22 % (CNN Indonesia, 2016). Hal ini

menjelaskan bahwa UKM tidak hanya berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi memiliki kontribusi yang besar dalam mengatasi masalah pengangguran.

UMKM mampu memberikan sumbangsih terhadap PDB yang tercatat mencapai 7,1 persen dan mampu menyerap 10,7 persen atau sekitar 12 juta total dari tenaga kerja. Memang kontribusinya cukup besar meskipun hanya usaha kecil. Untuk industri ekonomi kreatif ini sendiri juga tumbuh 5,76 persen pada tahun sebelumnya. Hal itu bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini diatas rata-rata. Untuk PDB nasional ini peran UMKM ini cukup penting karena mampu memberi nilai tambah hingga Rp 641,8 triliun. Walaupun begitu, pemerintah juga memiliki target tersendiri dari UMKM ini karena pemerintah merencanakan kontribusi PDB Ekonomi kreatif ditahun 2019 bisa mencapai 7 – 7,5 persen.

Data Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jateng mencatat pada 2012 jumlah UMKM binaan sebanyak 80.583 unit. Pada 2016 jumlahnya naik menjadi 115.751 unit. Sejalan dengan itu jumlah tenaga kerja pun meningkat pesat dari 345.622 orang menjadi 791.767 orang, sampai akhir tahun 2017 jumlah UMKM binaan mencapai 133.679 unit, dengan jumlah tenaga kerja telah mencapai 918.455 orang. Dengan berbagai program pendampingan, perkembangan UMKM pun menanjak naik. Dari sisi aset naik dari Rp 6,816 triliun menjadi Rp 22,891 triliun. Kenaikan signifikan juga dicatatkan dari sisi

omset yakni dari Rp 18,972 triliun menjadi Rp 43,570 triliun atau lebih dari 120 persen (jateng.tribunnews.com, 2018).

Namun meskipun UMKM memiliki peran penting dan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk Negara, UMKM ini juga masih memiliki kelemahan saat beroperasi sehingga pemerintah perlu untuk memberikan dukungan dan sokongan agar UMKM bisa berjalan dengan lancar. Beberapa permasalahan yang bisa kita jumpai pada UMKM adalah seperti kesulitan pemasaran, keterbatasan SDM, kesulitan bahan baku, keterbatasan inovasi dan teknologi, hingga kesulitan akses ke sumber pembiayaan yang cukup terbatas. Dengan mengetahui beberapa permasalahan tersebut, maka sudah semestinya pemerintah untuk memperhatikan bisnis kecil ini karena jika berkembang maka Negara juga akan mendapatkan keuntungan pemasukan.

Agar UMKM dapat bersaing dalam pasar nasional dengan unit usaha yang dikelola oleh Investor Asing. Dikarenakan banyak UMKM yang sudah bangkrut dikarenakan kalah bersaing dengan pasar-pasar moderen dikarenakan kekurangan modal dan tidak mampu melunasi bunga pinjaman yang tinggi. Berkaitan dengan pertumbuhan UMKM tersebut, perlu dilihat hubungan antara pertumbuhan UMKM dengan kemiskinan pada masyarakat, dan juga peran UKM mengurangi kemiskinan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi langkahlangkah kebijakan yang dapat ditempuh dalam pengembangan UMKM dalam rangka mengurangi kemiskinan. Namun jika pemerintah tidak campur tangan dalam

UMKM, maka dengan sendirinya UMKM akan semakin merosotkan petan usaha kecil disektor pertanian dan perdagangan.

Dengan semakin merosotnya peran usaha kecil disektor pertanian dan perdagangan, maka dua penyumbang besar terhadap nilai tambah dari kelompok usaha kecil ini dominasinya juga akan semakin mengecil dalam pembentukan PDB. Sehingga jika kecenderungan ini dibiarkan maka posisi usaha kecil akan kembali seperti sebelum krisis atau bahkan mengecil. Sementara itu usaha menengah yang sejak krisis mengalami kemerosotan diberbagai sektor, maka posisi usaha menengah semakin tidak menguntungkan. Padahal dalam proses modernisasi dan demokratisasi peranan kelas menengah ini sangat penting terutama untuk meningkatkan daya saing. Karena usaha menengah lebih mudah melakukan modernisasi dan mengembangkan jaringan ke luar negeri dalam rangka perluasan pasar

Batik merupakan warisan leluhur yang sudah mendunia. Unesco (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB) telah menetapkan Batik Indonesia sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi sejak 2 Oktober 2009. Terletak 5 KM dari Pusat Kota Solo, Kampung Laweyan merupakan berkah bagi Pemerintah Kota Solo. Kampung yang ada sejak tahun 1546 M atau masa Kerajaan Pajang kini menjadi pusat perhatian turis asing maupun domestik untuk melihat proses pembuatan batik dan tentunya membeli oleh-oleh khas Batik Solo. Kampung ini mulanya adalah sebuah pasar yang

menyediakan bahan baku tenun (Lawe) sejak zaman Kerajaan Pajang. Bahan baku kapas pada saat Kerajaan Pajang dipasok dari desa Pedan, Juwiring dan Gawok.

Kampung Batik Kemplong, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Sebagian besar masyarakat Indonesia memang mengenal Pekalongan sebagai sentra penghasil Batik terbesar. Bahkan slogan Kota Pekalongan adalah Kota Batik (Bersih, Aman, Tertib Indah Komunikatif). Kota Pekalongan yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa banyak dipengaruhi oleh kedatangan bangsa luar seperti Cina dan orang Belanda yang memperkenalkan corak Batik Belanda di Pekalongan.

Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa terdiri dari berbagai faktor seperti tenaga kerja, tanah dan modal termasuk mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, tenaga listrik, kemajuan teknologi dan lain-lain. Namun diantara semua faktor tersebut, faktor sumber daya manusia memegang peranan utama dalam meningkatkan produktivitas karena alat produksi dan teknologi pada hakekatnya adalah hasil karya manusia. Oleh karena itu, disamping produktivitas tanah dan modal yang biasanya ditonjolkan dan menjadi pusat perhatian adalah produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri, maupun yang berhubungan dengan lingkungan dan kebijakan pemerintah.

Perkembangan sektor industri batik di Solo dan Laweyan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Penyerapan tenaga kerja pada industri kecil secara internal dipengaruhi oleh tingkat upah, nilai produksi dan modal kerja. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Simanjuntak, 1985). Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan yang kemudian akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Nilai produksi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga keeja, apabila permintaan hasil produksi perusahaan atau industri meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Dengan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Modal kerja juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini karena penambahan modal akan meningkatkan bahan baku. Bahan baku yang banyak membutuhkan tenaga kerja yang banyak pula sehingga penambahan bahan baku akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah modal berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri batik di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Apakah nilai produksi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri batik Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah upah tenaga kerja berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri batik di Provinsi Jawa Tengah?

4. Apakah modal, nilai produksi, dan upah tenaga kerja secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri batik di Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh modal terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri batik di Provinsi Jawa Tengah
2. Menganalisis pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri batik Provinsi Jawa Tengah
3. Menganalisis pengaruh upah tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri batik di Provinsi Jawa Tengah
4. Menganalisis pengaruh modal, nilai produksi, dan upah tenaga kerja secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri batik di Provinsi Jawa Tengah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelola industri kecil, memberikan masukan tambahan yang berguna bagi perkembangan industri batik di Provinsi Jawa Tengah berupa informasi yang positif.

2. Bagi pemerintah terutama dinas koperasi dan UKM di Provinsi Jawa Tengah sebagai informasi dalam upaya mendukung industri batik di Provinsi Jawa Tengah.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan produksi batik dan ketenagakerjaan.